



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat 10270

**NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN
AUDIENSI KOMITE I DPD RI
Jakarta, 4 Desember 2025**

1. Hari/tanggal : Kamis, 4 Desember 2025
2. Pukul : 14.00 WIB – Selesai
3. Tempat : Ruang Rapat Majapahit, Gedung B Lantai 3, DPD RI
Jl. Gatot Subroto no. 6, Jakarta
4. Pimpinan Rapat :
 1. Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N. (Ketua Komite I DPD RI)
 2. Carel Simon Petrus Suebu, S.E. (Wakil Ketua I Komite I DPD RI)
 3. Bahar Buasan, S.T., M.S.M., M.Sc. (Wakil Ketua II Komite I DPD RI)
5. Sekretaris Rapat : Fahri Okta Syakban, S.E. (Kepala Bagian Sekretariat Komite I DPD RI)
6. Agenda : Audiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengenai pembentukan 3 (tiga) CDOB di Kabupaten Ketapang
7. Hadir : 4 (empat) orang dari 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komite I DPD RI

A. Audiensi Komite I DPD RI dibuka oleh Pimpinan Rapat, Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N., pada pukul 14.09 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum

- B. Pimpinan Rapat memberikan sambutan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Audiensi dilaksanakan berdasarkan surat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat terkait pemekaran tiga wilayah di Kabupaten Ketapang.
 - b. Pemekaran daerah merupakan salah satu kewenangan dari DPD RI sesuai amanah UUD RI 1945.

- c. Pemekaran daerah merupakan salah satu solusi dalam upaya memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Karena pemekaran akan mempersingkat rentang kendali dan mempercepat pemerataan pembangunan.
 - d. Hingga saat ini, Desartada sebagai dasar pemekaran daerah belum ada sehingga menghambat proses pembentukan CDOB. Komite I terus menyuarakan aspirasi pemekaran daerah dan berencana untuk melakukan rapat konsultasi dengan wakil presiden selaku ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
- C. Pemaparan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Paparan dari Karopem Pemprov Kalbar:
 - i. Kalimantan Barat sangat luas dan strategis karena berbatasan dengan Malaysia. Kabupaten Ketapang yang diusulkan untuk dimekarkan saat ini terdiri dari 20 kecamatan.
 - ii. Gubernur Kalimantan Barat sudah mengirimkan usulan pemekaran sesuai dengan aturan administrasi dan prosedur yang berlaku. Syarat administrasi telah pemprov terima dan cermati sehingga kami berharap tahun 2026 dapat ada kejelasan terkait pemekaran daerah.
 - iii. Setiap CDOB telah melakukan musyawarah dan mendeklarasikan lokasi ibu kota untuk setiap CDOB. Hal tersebut menandakan antusiasme dan aspirasi masyarakat Kabupaten Ketapang.
 - iv. Pemekaran Kabupaten Ketapang bukan sekadar kepentingan politis, tapi kebutuhan masyarakat yang terlalu jauh dari pemerintah kabupaten.
 - b. Paparan Wabup Ketapang:
 - i. Wabup memperkenalkan delegasi kepada pimpinan dan anggota Komite I DPD RI
 - ii. Upaya pemekaran ini sudah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu sebelum dimulainya moratorium, tetapi tidak dapat terlaksana karena moratorium terlanjur diberlakukan.

- iii. Syarat administratif telah kami penuhi untuk melanjutkan proses pemekaran daerah otonomi baru ini.
- iv. Kami sangat berharap pemerintah dapat menerbitkan peraturan untuk menampung aspirasi pemekaran daerah yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar janji politik.
- v. Kami sangat yakin secara ekonomi, CDOB ini dapat berjalan sesuai ketentuan. Kami sangat berharap mendapatkan prioritas pemekaran setelah moratorium dibuka nantinya.

D. Tanggapan dari anggota Komite I DPD RI

a. Sultan Hidayatullah

- i. Terkait pemekaran, Komite I mendukung seluruh upaya pemekaran. Masalah yang dihadapi biasanya dari DPR RI.

b. Andi Sofyan

- i. Dari seluruh pengusulan CDOB, ini yang paling lengkap karena diusulkan langsung oleh pemerintah daerah induk. Kami sangat mendukung.
- ii. Salah satu syaratnya adalah dana hibah dari daerah induk, kami sangat bersyukur kalau daerah induk dapat memenuhi syarat tersebut.
- iii. Pada masa sidang selanjutnya, kami akan berusaha untuk melaksanakan pertemuan dengan ketua DPOD untuk meluruskan permasalahan moratorium pemekaran daerah ini.

E. Penyerahan dokumen administrasi CDOB dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat kepada Komite I DPD RI

F. Kegiatan Audiensi Komite I DPD RI ditutup pada pukul 14.52 WIB

Jakarta, 4 Desember 2025
Kabag. Set. Komite I

Fahri Okta Syakban, S.E.
NIP. 197110102006041038